

BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA MUARA RINTIS KECAMATAN BATANG ALAI UTARA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Muhammad Pahraji¹, M. Arsyad², Barkatullah³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai

Email: pahraji161@gmail.com

ABSTRAK

BUMDES merupakan salah satu lembaga yang terdapat interaksi ekonomi antara pemerintah desa dengan masyarakat, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di desa Muara Rintis Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan penelitian menunjukkan cukup efektif, keberhasilan program di lihat pada indikator tujuan program adalah sudah baik, pelaksanaan program cukup baik pelaksanaannya Bumdes ini melibatkan masyarakat dan instansi-instansi yang terkait. Variabel keberhasilan sasaran dilihat pada ketepatan sasaran cukup baik, hasil program belum baik karena jumlah pengeluaran biaya lebih besar di bandingkan pendapatan, SOP belum baik. Variabel kepuasan terhadap program, pada indikator mengenai pelaksanaan kegiatan program belum baik, kepuasan terhadap pelaksanaan sudah baik. Variabel tingkat input dan output dilihat pada indikator input cukup baik merujuk pada berbagai sumber informasi ada, dan output cukup baik. Variabel pencapaian tujuan menyeluruh dilihat pada indikator strategi pencapaian menyeluruh cukup baik, karena strateginya dengan memberikan pelatihan dan pengetahuan terhadap pengelola Bumdes dan penilaian organisasi cukup baik karena bermanfaat dalam memberikan lapangan pekerjaan. Faktor penghambat yang mempengaruhi terdiri dari faktor pendukung adanya kerjasama dan koordinasi yang baik dimasyarakat untuk membuat Bumdes di Muara Rintis semakin maju, dan faktor penghambat rendahnya kualitas SDM penguasaan kemampuan manajerial yang kurang memadai.

Kata Kunci : Efektivitas, Bumdes

ABSTRACT

BUMDES is one of the institutions that has economic interaction between the village government and the village community. This study aims to determine the effectiveness of Village-Owned Enterprises (Bumdes) in Muara Rintis Village, Batang Alai Utara District, Hulu Sungai Tengah Regency and the factors that influence it using a qualitative approach. The results of the study showed that it was quite effective. The success of the program is seen in the program objective indicator which is good, the implementation of the program is quite good, the implementation of this Bumdes involves the community and related agencies. The target success variable is seen in the target accuracy indicator which is quite good, the program results are not good because the amount of expenditure is greater than income, the SOP is not good. The variable of satisfaction with the program, in the indicator regarding the implementation of program activities is not good, satisfaction with the implementation is good. The input and output level variables are seen in the input indicator which is good enough referring to various information resources available, and the output is good enough. The overall goal achievement variable is seen in the overall achievement strategy indicator, quite good, the strategy is to provide training and knowledge to Bumdes managers and the organizational assessment is quite good because it is useful in providing employment. The influencing factors consist of supporting factors for good cooperation and in the community to make Bumdes in Muara Rintis more advanced, inhibiting factors are the low quality of human resources and inadequate mastery of managerial skills.

Keywords: Effectiveness, Bumdes

PENDAHULUAN

Sebagai daerah yang memiliki otonomi penuh, untuk menjalankan pemerintahannya, maka desa harus mencari dana untuk mengembangkan desanya. Meski sekarang dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa desa akan mendapatkan bantuan dari APBN setiap tahunnya sekitar 600 juta hingga 1,2 Milyar yang tercantum dalam UU No. 6 Tahun 2014 pasal 72 ayat (1) dan ayat (4) tentang desa, akan tetapi desa tidak sepenuhnya menggantungkan pendapatannya dari bantuan tersebut. Karena sebelum Undang-undang tersebut diberlakukan bantuan alokasi dana desa tidak ada dan desa harus mengurus tenaga dan memutar otak untuk mendapatkan Pendapatan Desa yang maksimal. Maka dari itu desa harus menggali potensi desa baik dari segi Sumber Daya Alam (SDA) maupun dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di desa tersebut yang nantinya akan menjadi sumber pendapatan desa dan akan masuk kedalam kas desa atau keuangan desa.

Kuangan desa yang didapatkan dari sumber pendapatan desa haruslah dikelola dengan baik demi tercapainya pembangunan desa. Namun, kita ketahui bahwa sumber pendapatan desa sebagian besar berasal dari bantuan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, karena memang desa merupakan daerah otonom yang kecil sehingga jika hanya mengandalkan pendapatan asli desa tidak akan mampu meningkatkan pembangunan desa baik itu meningkatkan dalam segi infrastruktur maupun dalam segi administratif. . Sehingga perlu pengelolaan dan manajemen yang baik dalam pendapatan asli desa dan keuangan desa agar desa memiliki PADes yang memadai untuk menopang kesejahteraan masyarakat desa.

Salah satu strategi dalam memudahkan desa untuk mendapatkan sumber pendapatan desa adalah pemerintah membuat kebijakan yang mengatur hal tersebut. Salah satunya adalah undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang menyebutkan bahwa pemerintah desa juga dianjurkan untuk memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang berguna untuk mengatur perekonomian desa dan memenuhi kebutuhan serta menggali potensi desa, dan Undang-undang ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah pusat dalam meningkatkan peran desa untuk ikut berkecimpung dan turun tangan langsung dalam meningkatkan perekonomian desa. Undang-undang tersebut memayungi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa yang merupakan peraturan lanjutan dari UU No. 32 Tahun 2004 dimana dalam peraturan ini disebutkan bagaimana cara mendirikan dan mengelola BUMDES itu sendiri.

Badan usaha milik desa (BUMDes) merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang tumpang tindih di tingkat desa. Artinya tata aturan ini terwujud dalam mekanisme kelembagaan yang solid. Penguatan kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akan terarah pada adanya tata aturan yang mengikat seluruh anggota. Kemajuan ekonomi nasional hanya akan tercapai jika perekonomian regionalnya baik, karena hal ini akan menjamin penyelenggaraan pemerintah yang baik untuk diterapkan di semua tingkat pembangunan dan keputusan berdasarkan salah satu cara dalam upaya mengurangi kemiskinan di Indonesia.

Kuangan desa yang didapatkan dari sumber pendapatan desa haruslah dikelola dengan baik demi tercapainya pembangunan desa. Namun, kita ketahui bahwa sumber pendapatan desa sebagian besar berasal dari bantuan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, karena memang desa merupakan daerah otonom yang kecil sehingga jika hanya mengandalkan pendapatan asli desa tidak akan mampu meningkatkan pembangunan desa baik itu meningkatkan dalam segi infrastruktur maupun dalam segi administratif. . Sehingga perlu pengelolaan dan manajemen yang baik dalam pendapatan asli desa dan keuangan desa agar desa memiliki PADes yang memadai untuk menopang kesejahteraan masyarakat desa.

Salah satu strategi dalam memudahkan desa untuk mendapatkan sumber pendapatan desa adalah pemerintah membuat kebijakan yang mengatur hal tersebut. Salah satunya adalah (Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah) yang menyebutkan bahwa pemerintah desa juga dianjurkan untuk memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang berguna untuk mengatur perekonomian desa dan memenuhi kebutuhan serta menggali potensi desa, dan Undang-undang ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah pusat dalam meningkatkan peran desa untuk ikut berkecimpung dan turun tangan langsung dalam meningkatkan perekonomian desa. Undang-undang tersebut memayungi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa yang merupakan peraturan lanjutan dari UU No. 32 Tahun 2004 dimana dalam peraturan ini disebutkan bagaimana cara mendirikan dan mengelola BUMDES itu sendiri.

BUMDES sendiri memiliki literatur yang sama dengan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yaitu sama- sama mengelola aset dibidangnya hanya saja BUMN merupakan badan usaha tingkat nasional yang dimiliki oleh negara dan BUMD tentu saja merupakan badan usaha milik daerah yang mengelola aset-aset yang ada di daerah, hanya saja BUMDES ini ruang lingkupnya masih sederhana tidak seperti BUMN yang Nasional dan BUMD yang ruang lingkupnya sekitar provinsi, kabupaten/kota.

Peran pemerintah daerah sangatlah penting untuk kemajuan BUMDES ini, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa pasal 22 ayat dan ayat (2) menyebutkan bahwa pemerintah daerah baik itu pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan maupun Pemerintah Kabupaten/Kota haruslah melakukansosialisasi, pembinaan, bimbingan teknis, pengembangan manajemen dan sumber daya manusia serta memberikan fasilitas akselerasi permodalan. Namun faktanya pemerintah daerah sendiri seperti acuh tidak memberikan dukungan secara maksimal kepada BUMDES Desa Muara Rintis Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah. BUMDES yang ada di desa Muara Rintis bernama BUMDES “Sumber Berkah” bergerak dibidang Kandang Ayam pedaging.

Berdasarkan hasil observasi sementara di ketahui bahwa dalam penelitian ini terdapat beberapa masalah yaitu:

1. Dari aspek keberhasilan program, program Bumdes “Sumber Berkah” masih belum sepenuhnya berhasil dikarenakan modal awal Bumdes dari awal tahun 2023 yakni Rp. 100.000.000 (*seratus juta rupiah*) mengalami penyusutan setiap bulannya, hal ini dikarenakan jumlah pengeluaran biaya lebih besar di bandingkan pendapatan yang diterima oleh Bumdes setiap bulannya. Berikut rinciannya :

Tabel Kas Bumdes “Sumber Berkah”

No	Bulan	Keterangan	Kas masuk	Kas keluar
1	Januari 2024	Biaya Operasional		Rp. 4.322.000
		Pendapatan	Rp. 4.002.000	
2	Februari 2024	Biaya Operasional		Rp 3.400.000
		Pendapatan	Rp. 3.656.000	
3	Maret 2024	Biaya Operasional		Rp. 5.342.000
		Pendapatan	Rp. 4.923.000	

Sumber : Bumdes Sumber Berkah, 2024

2. Kurangnya pemeliharaan ayam pedaging yang baik dalam program Bumdes “Sumber Berkah” seperti pemberian obat-obatan, pemberian pakan dan pemantauan kondisi kandang. Sehingga pemeliharaan ayam tidak optimal maka ayam berdampak negatif pada kesehatan ayam.

Hal ini dapat menghambat harga jual ayam menyusut dan tidak mencapai hasil maksimal. Misalnya dalam satu kali panen tiap bulannya menghasilkan sebesar Rp. 4.002.000 (*empat juta dua ribu rupiah*) dan ternyata hasil yang di keluarkan tiap bulannya sebesar Rp. 4.322.000 (*empat juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah*). masyarakat terhadap Bumdes “Sumber Berkah”.

3. Penguasaan Kemampuan Manajerial yang Kurang Memadai dan program BUMDes tidak sesuai dengan kebutuhan harapan anggota dan masyarakat setempat ada yang setuju dan tidak dengan adanya program BUMDes yang bergerak di bidang ayam pedaging. Hal ini dikarenakan tak mudah bagi desa mendapatkan seorang yang memiliki kemampuan manajerial unggul dalam hal pengelolaan usaha. Kalaupun ada warga yang memiliki kemampuan seperti itu biasanya sudah bekerja di tempat lain dan kalau dia ditunjuk mengelola BUMDes maka itu hanya sebatas sambilan saja. Akibatnya, BUMDes tidak melaju dan jalan di tempat. Sementara jika menunjuk orang dengan kapasitas yang tidak memadai, ditandai dengan track record yang dimilikinya, maka sama saja dengan membawa BUMDes pada arah yang lebih mengawatirkan.

Menurut Tadi (Aryadi, 2020) Efektifitas yang diartikan sebagai keberhasilan melakukan program dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor yang dapat menentukan apakah efektifitas kerja pegawai berhasil dilakukan dengan baik atau tidak. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas kerja antara lain: (1) Disiplin Kerja Dengan menerapkan pola disiplin yang kuat terhadap tanggung jawab pekerjaan maka akan menghasilkan suatu efektifitas kerja yang baik. (2) Kemampuan Personal Peningkatkan kemampuan personal dalam hal teknis maupun non teknis sangat mendukung hasil dan kecepatan pekerjaan. (3) Pengawasan Dengan adanya pengawasan maka kinerja pegawai dapat terus terpantau dan hal ini dapat memperkecil resiko kesalahan dalam pelaksanaan tugas. (4) Budaya kerja Pola akan mempengaruhi suatu permasalahan pekerjaan. (5)

Anggaran Dengan dukungan anggaran yang sesuai dan penggunaan yang secara tepat akan menghasilkan suatu kegiatan yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara baik. (6) Perlengkapan dan fasilitas Adalah suatu sarana dan peralatan yang disediakan oleh pimpinan dalam bekerja. Semakin baik sarana yang disediakan oleh perusahaan akan mempengaruhi semakin baiknya kerja seseorang dalam mencapai tujuan atau hasil yang diharapkan.

Menurut (Mukhtar, Dkk, 2016) mengatakan bahwa Adanya pengaruh langsung kepemimpinan transformatif terhadap efektivitas pimpinan. Dengan kata lain tinggi rendahnya efektivitas pimpinan mampu dipengaruhi oleh kepemimpinan transformatif. Ini juga berarti bahwa jika kepemimpinan transformatif dilaksanakan oleh pimpinan dalam memimpin dengan baik, mengakibatkan efektivitas pimpinan dalam memimpin juga baik.

Dalam mengukur efektivitas ini di perlukan indikator atau alat ukur efektivitas. Menurut Campbell J.P dalam (Mutiarin, 2014) menguraikan alat ukur program sebagai berikut:

1. Keberhasilan program

Efektivitas program bisa dilihat dari kemampuan sebuah instansi atau organisasi dalam melaksanakan program sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, keberhasilan program dapat dilihat dari tercapai atau tidaknya tujuan program sebelumnya.

2. Keberhasilan sasaran

Keberhasilan sasaran dapat dicapai dengan seberapa besar output yang telah dicapai. Keberhasilan sasaran mengukur seberapa jauh output yang dihasilkan dari program tersebut untuk mencapai tujuan program.

3. Kepuasan terhadap program

Kepuasan program merupakan kriteria untuk mengukur apakah masyarakat atau pengguna jasa sudah puas dengan program yang diberikan. Semakin berkualitas suatu program maka semakin puas pengguna jasa pelayanan dan akan memberi nilai positif ke lembaga yang bersangkutan.

4. Tingkat input dan output

Tingkat input dan output merupakan suatu pengukuran yang melihat perbandingan antara input dan output, jika output lebih besar daripada input dapat dikatakan suatu program telah berjalan dengan baik, sebaliknya bila input lebih besar dari output maka suatu program tidak berjalan dengan efektif.

5. Pencapaian tujuan menyeluruh

Pencapaian tujuan menyeluruh merupakan sebuah indikator yang mengukur sejauh mana instansi atau organisasi melaksanakan tugasnya sehingga bisa mencapai tujuan menyeluruh.

Menurut (Faizurah, 2014) faktor- faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja dalam organisasi yaitu:

- 1) Waktu, ketepatan waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan merupakan faktor utama. Semakin lama tugas yang dibebankan itu dikerjakan, maka semakin banyak tugas lain menyusul dan hal ini akan memperkecil tingkat efektivitas kerja karena memakan waktu yang tidak sedikit.
- 2) Tugas, bawahan harus diberitahukan maksud dan pentingnya tugas-tugas yang didelegasikan kepada karyawannya.
- 3) Produktivitas, seorang pegawai mempunyai produktivitas kerja yang tinggi dalam bekerja tentunya akan dapat menghasilkan efektivitas kerja yang baik demikian pula sebaliknya.
- 4) Motivasi, pimpinan dapat mendorong pegawainya melalui perhatian pada kebutuhan dan tujuan mereka yang sensitif. Semakin termotivasi karyawan untuk bekerja secara positif semakin baik pula kinerja yang dihasilkan.
- 5) Evaluasi Kerja, pimpinan memberikan dorongan, bantuan dan informasi kepada bawahannya, sebaliknya pegawai harus melaksanakan tugas dengan baik dan menyelesaikan untuk dievaluasi tugas terlaksana dengan baik atau tidak.
- 6) Pengawasan, dengan adanya pengawasan maka kinerja pegawai dapat terus terpantau dan hal ini dapat memperkecil resiko kesalahan dalam melaksanakan tugas.
- 7) Lingkungan Kerja, adalah menyangkut tata ruang, cahaya alam dan pengaruh suara yang mempengaruhi konsentrasi seseorang sewaktu bekerja.

Perlengkapan dan Fasilitas, adalah suatu sarana dan peralatan yang disediakan oleh pimpinan dalam bekerja. Fasilitas yang kurang lengkap akan mempengaruhi kelancaran pegawai dalam bekerja

Pengertian Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan menurut UU No. 32 Tahun 2004 yang sekarang di ubah dengan (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa) atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional berada di kabupaten /kota, sebagaimana yang dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa, adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Maka bisa disimpulkan, desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki adat dan asal-usul yang sama yang diakui oleh negara dan menjalankan pemerintahannya secara otonom.

Pengertian BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2004 BUMDES adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Dan BUMDES menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (Padesa). Jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDES, maka kondisi itu akan mendorong setiap pemerintah desa untuk mendirikan badan usaha ini. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDES harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi lainnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDES dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu agar tidak berkembang sistem usaha kapitalis dipedesaan yang dapat mengganggu nilai-nilai kehidupan masyarakat.

METODE

Penelitian ini akan dilakukan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Muara Rintis Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kode Pos 71391. Secara astronomis Batang Alai Utara terletak pada 2o 38' – 2o 46' Lintang Selatan dan 115o 14' – 115o 23' Bujur Timur. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2022:9) mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrument kunci.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe dekskriptif kualitatif (Anggara, 2015). Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan melalui dokumentasi. Sumber data yang diambil melalui *purposive sampling* informan yang berjumlah 10 orang. Setelah data sudah terkumpul kemudian kita analisis dengan menggunakan teknik meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengjian kredibilitas data melalui perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, menggunakan bahan referensi dan member *check* (Sugiyono, 2022).

PEMBAHASAN

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa menjadi acuan terhadap Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Muara Rintis Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan mengenai tempat penelitian di Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Muara Rintis Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Penelitian mengambil teori Champbell J.P dalam Dyah Mutiarin & Arif Zaenudin (2014: 96-97) dengan indikator keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output dan pencapaian tujuan menyeluruh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Muara Rintis Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan faktor-faktor yang

mempengaruhi efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Muara Rintis Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat dari uraian berikut :

1. Keberhasilan Program

a. Tujuan Program

Tujuan Bumdes untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Muara Rintis melalui pemberdayaan dan program bumdes ini diharapkan dapat meningkatkan lapangan kerja, pendapatan dan peningkatan masyarakat, jadi mereka yang tidak bekerja dapat bekerja dan ada penghasilan selain itu untuk mensejahterakan masyarakat supaya masyarakat ini mempunyai badan usaha sendiri dan yang kedua supaya ada perekonomian didesa ini meningkat dari sebelum-sebelumnya dan mengurangi kesenjangan ekonomi didesa Muara Rintis misalnya yang belum bekerja dapat ikut bekerja di Bumdes ini.

b. Perencanaan Program

Mengenai perencanaan cukup baik dimulai dengan analisis potensi serta kebutuhan desa untuk meremuskan programnya atau usaha yang relevan untuk dikembangkan masyarakat agar dapat direalisasikan kepada masyarakat. Perencanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Muara Rintis terdiri dari berbagai tahapan sebagai berikut :

- 1) Menyusun Job Deskripsi (Gambaran Pekerjaan),.
- 2) Menetapkan Sistem Koordinasi..
- 3) Menyusun Pedoman Kerja Organisasi.
- 4) Menyusun Desain Sistem Informasi..
- 5) Menyusun Rencana Usaha.
- 6) Menyusun Sistem Administrasi dan Pembukuan.
- 7) Mengurus Legalitas Hukum.

c. Pelaksanaan Program

Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Muara Rintis Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengenai pelaksanaan program cukup baik Pelaksanaanya Bumdes ini melibatkan pendirian dan pengembangan berbagai usaha yang menjadi fokus program bumdes seperti berkerjasama dengan instansi terkait seperti Dinas Perternakan.

2. Keberhasilan Sasaran

a. Ketepatan Sasaran

Ketepatan sasaran dapat disimpulkan sudah tepat sasaran karena sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ketepatan sasaran sudah baik karena Usaha Ayam pedaging ini sesuai dengan keadaan yang ada di desa Muara Rintis yang masyarakatnya banyak bermata pencaharian sebagai peternak ayam. Serta dengan adanya bumdes ini masyarakat dapat memperoleh bahan-bahan peternakan yang berkualitas dengan mudah.

b. Hasil dari Program

Hasil dari program belum baik karena Kurangnya pemeliharaan ayam pedaging yang baik dalam program Bumdes “Sumber Berkah” seperti pemberian obat-obatan, pemberian pakan dan pemantauan kondisi kandang. Sehingga pemeliharaan ayam tidak optimal maka ayam yang berdampak pada turunya hasil pendapatan. Dengan Kata lain jumlah pengeluaran biaya lebih besar di bandingkan pendapatan yang diterima oleh Bumdes setiap bulannya.

c. Standar Operasional Prosedur (SOP)

SOP pelaksanaan kegiatan operasional belum baik karena tidak adanya SOP yang tertera jelas terkait proses kegiatan Bumdes di Desa Muara Rintis, karena tidak adanya SOP yang tersedia, selama ini bumdes berjalan mengalir tanpa arahan yang pasti.

3. Kepuasan Terhadap Program

a. Pelaksanaan Kegiatan Program

Pelaksanaan kegiatan program belum baik karena Penguasaan Kemampuan Manajerial yang Kurang Memadai dan program BUMDes tidak sesuai dengan kebutuhan harapan anggota dan masyarakat setempat ada yang setuju dan tidak dengan adanya program BUMDes yang bergerak di bidang ayam pedaging. Hal ini dikarenakan tak mudah bagi desa mendapatkan seorang yang memiliki kemampuan manajerial unggul dalam hal pengelolaan usaha. Kalaupun ada warga yang memiliki kemampuan seperti itu biasanya sudah bekerja di tempat lain dan kalau dia ditunjuk mengelola BUMDes maka itu hanya sebatas sambilan saja. Akibatnya, BUMDes tidak melaju dan jalan di tempat. Sementara jika menunjuk orang dengan kapasitas yang tidak memadai, ditandai dengan *track record* yang dimilikinya, maka sama saja dengan membawa BUMDes pada arah yang lebih mengawatirkan.

b. Kepuasan terhadap pelaksanaan

Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Muara Rintis Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengenai kepuasan terhadap pelaksanaan sudah baik, karena dengan adanya Bumdes ini masyarakat dapat mendapatkan bahan peternak ayam dengan kualitas yang baik dengan jarak dekat dan dengan Bumdes terciptanya lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan di desa Muara Rintis ini .

4. Tingkat Input dan Output

a. Input

Input cukup baik dilihat dari adanya modal awal anggaran dalam bumdes, keterampilan dan pengetahuan kita dalam bumdes ini dalam program. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan bahwa input cukup baik merujuk pada berbagai sumber daya informasi ada, dukungan yang diperlukan untuk menjalankan bumdespun harus efektif juga dan juga harus bekerja sama benar-benar bersatu dengan pengurus bumdes dan dilihat dari adanya modal awal anggaran dalam bumdes, keterampilan dan pengetahuan kita dalam bumdes ini dalam program.

b. Output

Dengan perbandingan tingkat input dan output cukup baik karena menciptakan peluang dan mendukung kebutuhan layanan umum warga dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

5. Pencapaian Tujuan Menyeluruh

a. Strategi Pencapaian Tujuan Menyeluruh

Mengenai strategi pencapaian tujuan menyeluruh dilakukan dengan melatih pengelola bumdes agar dapat meningkatkan keberhasilan pencapaian pada bumdes muara Rintis, strateginya dengan memberikan pelatihan dan pengetahuan terhadap pengelola BUMdes untuk mensukseskan program bumdes.

b. Penilaian Organisasi

Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Muara Rintis Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengenai penilaian organisasi, cukup bagus karena bumdes ini bermanfaat untuk masyarakat sekitar dan membuat lapangan pekerjaan.

Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Muara Rintis Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Berikut ini adalah faktor yang mempengaruhi Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Muara Rintis Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah:

1) Faktor Mendukung

Hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Muara Rintis Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah adanya kerjasama dan koordinasi yang bagus dimasyarakat untuk membuat bumdes di Muara Rintis semakin maju.

2) Faktor Penghambat

Hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Muara Rintis Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah rendahnya kualitas SDM Penguasaan Kemampuan Manajerial yang Kurang Memadai dan program BUMDes tidak sesuai dengan kebutuhan harapan anggota dan masyarakat setempat ada yang setuju dan tidak dengan adanya program BUMDes yang bergerak di bidang ayam pedaging. Hal ini dikarenakan tak mudah bagi desa mendapatkan seorang yang memiliki kemampuan manajerial unggul dalam hal pengelolaan usaha. Kalaupun ada warga yang memiliki kemampuan seperti itu biasanya sudah bekerja di tempat lain dan kalau dia ditunjuk mengelola BUMDes maka itu hanya sebatas sambilan saja. Akibatnya, BUMDes tidak melaju dan jalan di tempat. Sementara jika menunjuk orang dengan kapasitas yang tidak memadai, ditandai dengan track record yang dimilikinya, maka sama saja dengan membawa BUMDes pada arah yang lebih mengawatirkan.

SIMPULAN

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Muara Rintis Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah cukup efektif, Keberhasilan program dilihat pada indikator tujuan program adalah sudah baik, tujuan Bumdes untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perencanaan cukup baik dimulai dengan analisis potensis serta kebutuhan desa. pelaksanaan program cukup baik pelaksanaanya Bumdes ini melibatkan masyarakat dan instansi-instansi yang terkait. Variabel keberhasilan sasaran dilihat pada indikator ketepatan sasaran cukup baik, hasil program belum baik karena dikarenakan jumlah pengeluaran biaya lebih besar di bandingkan pendapatan yang diterima oleh Bumdes setiap bulannya, SOP belum baik, karena tidak adanya SOP yang tersedia , selama ini bumdes berjalan mengalir tanpa arahan yang pasti. Variabel Kepuasan terhadap program, pada indikator mengenai pelaksanaan kegiatan program belum baik karena Penguasaan Kemampuan Manajerial yang Kurang Memadai, kepuasan terhadap pelaksanaan sudah baik, karena dengan adanya bumdes ini masyarakat dapat mendapatkan bahan peternak ayam dengan kualitas yang baik dengan jarak dekat dan dengan bumdes terciptanya lapangan pekerjaan. Variabel tingkat input dan output dilihat pada indikator input cukup baik merujuk pada berbagai sumber daya informasi ada, dukungan yang diperlukan dalam menjalankan bumdespun harus efektif juga dan output cukup baik karena

menciptakan peluang dan jaringan pasar. Variabel pencapaian tujuan menyeluruh dilihat pada indikator strategi pencapaian menyeluruh, cukup baik, strateginya dengan memberikan pelatihan dan pengetahuan terhadap pengelola bumdes dan penilaian organisasi cukup bagus karena bermanfaat dalam memberikan lapangan pekerjaan. Faktor yang mempengaruhi terdiri dari faktor pendukung adanya kerjasama dan koordinasi yang baik dimasyarakat untuk membuat bumdes di Muara Rintis semakin maju, faktor penghambat rendahnya kualitas SDM Penguasaan Kemampuan Manajerial yang Kurang Memadai. Ada beberapa saran yang penulis berikan kepada tempat penelitian, yaitu: Untuk Pemerintah Desa diharapkan agar dapat berkerjasama dalam mendukung pelaksanaan program-program yang ada di BUMDes, Untuk Pengelola BUMDes disarankan kepada Pengelolaan BUMDes untuk lebih memprioritaskan waktu dan tempatnya dalam kegiatan-kegiatan BUMDes agar tugas-tugas yang diberikan bisa dijalankan dengan baik dan pengelola lebih memperlancar hubungan komunikasi dengan pengawas atau lembaga pemerintah lainnya agar masalah atau kendala yang sedang dihadapi bisa diatasi secara bersama-sama.

DAFTAR PUSTAKA

Anggara, Sahya. 2015. *Metode Penelitian Administrasi*. . Bandung: Pustaka Setia.

Affrian, R. (2022) 'Pemberdayaan Kelompok Tani Budi Karya Desa Ampukung Kecamatan Kalua Kabupaten Tabalong', *Administraus*, 6(3), pp. 98–111.

Anshari, M.R. (2021) 'KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL CAMAT DI KANTOR KECAMATAN SUNGAI TABUKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Cross-border*, 4(2), pp. 304–323.

Arlan, A.S. (2022) 'KINERJA PEGAWAI PADA UPT BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN LOKPAIKAT KABUPATEN TAPIN', *Al'iidara Balad*, 4(2), pp. 14–21.

Arlan, A.S. (2023) 'Kinerja Dinas Perpustakaan Untuk Peningkatan Minat Membaca Masyarakat Tapin', *Administraus*, 7(3), pp. 20–26.

Baihaqi, A. (2022) 'Kinerja Pegawai Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Pada Kantor Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Al'iidara Balad*, 4(1), pp. 1–17.

Berkatillah, A., Baihaqi, A. and Rahman, A.A. (2023) 'PENGARUH MOTIVASI DAN KOMPENSASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(8), pp. 3005–3015.

Febriadi, H. (2021a) 'DISIPLIN KERJA APARATUR PADA KANTOR DESA TAMBALANG RAYA KECAMATAN SUNGAI TABUKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al'iidara Balad*, 3(1), pp. 40–52.

Febriadi, H. (2021b) 'MOTIVASI PIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA DINAS PEMBERDYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Administraus*, 5(1), pp. 1–17.

Febriadi, H. (2021c) 'UPAYA PENINGKATAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DALAM PROGRAM KERJA PADA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.', *Al'iidara Balad*, 3(2), pp. 40–57.

Noorrahman, M.F. (2023) 'Peran Komunikasi Antar Budaya terhadap Adaptasi Mahasiswa Perantau di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai', *TASHWIR*, 11(02), pp. 137–148.



Noorrahman, M.F., Sairin, M. and Janati, J. (2023) 'PERAN DUKUNGAN SOSIAL DALAM MENGURANGI PRASANGKA SOSIAL PADA MAHASISWA BARU YANG BERSTATUS SEBAGAI MAHASISWA PENDATANG', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(5), pp. 1751–1756.

Oktavianty, P.A. *et al.* (2023) 'Evaluasi Program Perbaikan Gizi Masyarakat Kategori Balita Berstatus Stunting Di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Program Gerakan Atasi Stunting Dengan ASI "GUSI")', *Jurnal Niara*, 15(3), pp. 388–399.

Raudah, S., Amalia, R. and Nida, K. (2022) 'PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA BERBASIS MASYARAKAT DI KELURAHAN BATU PIRING KECAMATAN PARINGIN SELATAN KABUPATEN BALANGAN', *Al'iidara Balad*, 4(1), pp. 49–58.

Raudah, S. and Maulana, M.A. (2023) 'Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal Niara*, 16(2), pp. 408–415.

Raudah, S. and Mujahadah, S. (2023) 'PENGARUH MUTASI TERHADAP PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al'iidara Balad*, 5(1), pp. 18–24.

Setiawan, I. (2022) 'Pernikahan Dini Di Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal Niara*, 15(2), pp. 331–339.

Setiawan, I. (2023) 'Partisipasi Masyarakat Dalam Program Keluarga Berencana Di Kecamatan Amuntai Utara', *Jurnal Niara*, 16(1), pp. 14–19.

Setiawan, I. (2024) 'Relevansi Tenaga Honorer Terhadap Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara', *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 479–483.

Trio, S. *et al.* (2023) 'Civil Society Participation In Natural Resource Management In Conservation Areas: An Empirical Study Of Tesso Nilo National Park, Riau Province', *Вопросы государственного и муниципального управления*, (5S1), pp. 48–68.

Aryadi, T. 2020. *Analisis Efektivitas Kerja Pegawai*. Cirebon: Cv. Elso Pro .

Mukhtar, Dkk. 2016. *Efektivitas Pimpinan Kepemimpinan Transformatif dan Komitmen organisasi*. Sleman: CV. Budi Utama.

Faizurah, A. 2014. *Efektivitas Kerja Pegawai Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan*. Makassar: Universitas Hasanuddin Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.

Mutiarin, Dyah. dan Arif zainudin. 2014. *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan* . Yogyakarta: Pustaka Pelaja.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.